

WHO Imbau Negara Asia Pasifik Siap Hadapi Lonjakan Covid-19

MANILA(IM) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberi peringatan pada negara-negara di Asia Pasifik untuk bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang dipicu varian Omicron. WHO juga mengimbau untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Kemudian, segera melakukan vaksinasi secara penuh untuk bersiap menghadapi.

Dilansir dari Reuters, Jumat (3/12), Omicron pertama kali dijumpai di Afrika Selatan pada November dan ditetapkan oleh WHO sebagai "varian yang diwaspadai". Para ilmuwan masih mengumpulkan data untuk menentukan cara penularan Omicron dan tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkan.

Varian Covid-19 Omicron dilaporkan di 20 negara lebih dan pekan ini mulai merembet ke Asia, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, serta India. Banyak negara yang mulai memperketat aturan perjalanan.

"Kendali perbatasan dapat mengulur waktu, namun semua negara dan masyarakat harus bersiap menghadapi lonjakan kasus baru," kata direktur regional WHO untuk Pasifik barat, Takeshi Kasai, saat konferensi pers virtual.

"Masyarakat seharusnya tidak mengandalkan pembatasan perbatasan. Yang terpenting adalah bersiap dengan varian ini, yang berpotensi lebih menular. Sejuah ini informasi yang ada menunjukkan bahwa kami tidak perlu mengubah pendekatan kami," tambahnya.

Kasai mengatakan, negara-negara harus memetik pelajaran dari penanganan varian Delta. Ia juga mendesak agar otoritas memvaksin kelompok rentan secara lengkap serta menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti pemakaian masker dan jaga jarak sosial. Australia menjadi negara terbaru yang melaporkan penularan komunitas Omicron pada Jumat, sehari setelah muncul lima kasus lokal di lima negara bagian AS. ● gul



LOKASI LEDAKAN DI HAMBURG - JERMAN

Sebuah kendaraan yang rusak berat di depan sebuah gedung setelah ledakan yang melukai satu orang di sebuah apartemen di kota bagian utara Hamburg, Jerman, Kamis (2/12).

PBB: 274 Juta Orang Butuh Bantuan Tahun 2022

Jumlah orang yang membutuhkan bantuan pada 2022 akan naik 17 persen.

JENEWA(IM) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, pada 2022 akan ada 274 juta orang yang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang berada di Afghanistan, Ethiopia, Myanmar, Suriah, dan Yaman. Mereka hidup menghadapi tantangan berat seperti perang, gangguan keamanan, kelaparan, perubahan iklim dan pandemi virus korona.

Kantor Koordinasi untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA) di bawah PBB memaparkan dalam laporan tahunannya, bahwa jumlah orang yang membutuhkan bantuan pada 2022 akan naik 17 persen. Badan ini menyerukan agar donor mengucurkan 41 miliar dolar AS untuk membantu sekitar 183 juta orang yang paling mendesak untuk dibantu.

"Krisis iklim lebih dulu menghantam orang-orang yang paling rentan di dunia dengan dampak terburuk. Konflik berkepanjangan menghantam, dan instabilitas memburuk di sejumlah bagian dunia, terutama Ethiopia, Myanmar, dan Afghanistan," kata Kepala OCHA Martin Griffiths, Jumat (3/12).

Seruan ini menunjukkan kebutuhan berbagai badan PBB dan mitra mereka. Namun, tampaknya OCHA pun tak terlalu ambisius bahwa seruan tersebut akan dipenuhi.

Tahun ini donor mengucurkan 17 juta dolar AS untuk proyek tahun lalu yang dipaparkan OCHA dalam Global Humanitarian Overview tahun lalu. Namun, dana itu hanya separuh dari permintaan PBB untuk sepanjang 2021.

Tahun ini, kata Griffiths, telah menjangkau 70 persen dari orang yang disasar. "Kami sadar bahwa kami tidak akan mendapatkan hingga 41 miliar dolar AS, seperti yang kami harapkan," kata Griffiths.

Dari permintaan dana kali ini, penggunaannya proyek khusus di 30 negara. Separuh dari mereka ada di Afrika, dan sebagian lagi di Timur Tengah atau Amerika Selatan.

Griffiths kemudian mengutip perkiraan yang dibuat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), yang menyebutkan ada 45 juta orang berisiko kelaparan. Mereka tersebar di puluhan negara.

"Bantuan kemanusiaan amat berarti," kata Griffiths. "Kita telah menghentikan kelaparan yang mempengaruhi setengah juta jiwa di Sudan Selatan, kita

telah mengirimkan bantuan kesehatan kepada 10 juta jiwa di Yaman, kita juga telah membantu vaksinasi jutaan orang di Myanmar," katanya.

OCHA mengatakan, lebih dari 24 juta orang membutuhkan bantuan penyambung hidup seperti di Afghanistan. Mereka didera konflik, kekacauan politik, virus korona, guncangan ekonomi, dan kekeringan terburuk yang pernah terjadi dalam satu generasi.

"Kita tidak pernah meninggalkan Afghanistan. Kita akan hadir di sana bersama program yang ditargetkan pada 2022, tiga kali lipat besarnya dari 2021. Alasannya karena kebutuhan dan kondisi yang begitu beragam, yang tentu Anda semua sudah tahu," katanya.

Menurutnya, situasi di Ethiopia pun dalam kondisi "paling mengerikan", jika diukur dari tingkat kebutuhan hidup yang mendesak. Ia khawatir akan kemungkinan masuknya pasukan

perlawanan di ibu kota, Addis Ababa. Saat ini Pemerintah Ethiopia masih berhadapan dengan pasukan perlawanan dari kawasan Tigray.

Dewan di Bank Dunia mendukung keputusan mengucurkan 280 juta dolar AS kepada dua badan bantuan di Afghanistan. Dana tersebut berasal dari dana perwalitan yang selama ini dibekukan. Hal ini diungkap dua sumber, Rabu (1/12).

Keputusan itu harus disetujui oleh 31 donor yang tergabung dalam badan Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) yang dipimpin Bank Dunia. Amerika Serikat adalah pendonor terbesar di antara 31 donor.

Para donor dijadwalkan bertemu pada Jumat (3/12) ini. Sedangkan dua badan bantuan yang dipercaya menyalurkan bantuan adalah FAO dan badan PBB yang mengurus anak-anak, Unicef. ● tom

Macron Sebut PM Inggris Boris Johnson Badut



EMMANUEL MACRON Presiden Prancis

PARIS(IM) - Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan menyebut Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson sebagai badut. Ia juga mengatakan memalukan melihat negara yang begitu besar, yang bisa diajak bekerja sama oleh Prancis, dijalan oleh orang bodoh.

Menurut surat kabar satir mingguan Prancisc, Le Canard Enchaîné, Macron membuat beberapa pernyataan yang sangat kontroversial dan tidak diplomatik tentang koleganya itu selama pertemuan di Zagreb pada akhir November lalu.

Le Canard Enchaîné mengklaim pada hari Rabu bahwa Macron mengatakan Johnson meminta maaf atas caranya bertindak di depan umum dan penidiriannya tentang lisensi penangkapan ikan untuk pukat Prancis serta kesepakatan kapal selam yang membuat pabrikan Prancis kehilangan kontrak USD40 miliar dengan Australia.

"Secara pribadi, dia memberi tahu saya bahwa dia menyesal telah bertindak seperti yang dia lakukan, mengakui bahwa dia pertama-tama dan terutama mengakomodasi opini publik," kata Macron seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (3/12).

Ia menambahkan bahwa Johnson tampaknya menyadari bahwa Brexit sebenarnya adalah kekacauan besar.

Menurut laporan tersebut, Macron menunjuk pada kekurangan bahan bakar dan rak kosong sebagai bukti,

meskipun banyak orang telah menolak Brexit sebagai penyebab masalah dari rantai pasokan.

Macron rupanya menggambarkan hubungannya dengan perdana menteri Inggris itu sebagai "sirkus." Macron mencatat bahwa mereka akan berbicara secara langsung, dan semuanya baik-baik saja, tetapi kemudian dia pergi serta melakukan sesuatu dengan "cara yang tidak elegan."

Komentar itu tampaknya merujuk pada penerbitan surat Johnson yang ditujukan kepada Macron pada 25 November di mana ia menguraikan rencana untuk menangan krisis migran satu hari setelah 27 orang tewas dalam penyeberangan di Selat Inggris yang gagal.

"Sangat menyedihkan melihat negara yang hebat, yang dengannya kita dapat melakukan banyak hal, dipimpin oleh seorang badut. Seorang badut atau orang bodoh yang sombong? Atau keduanya?" Macron menyimpulkan.

Hubungan antara Inggris dan Prancis telah memburuk dalam beberapa dekade di tengah perselisihan tentang Brexit, penangkapan ikan, dan pakta kapal selam AUKUS.

Prancis bereaksi terhadap surat Johnson yang dipublikasikan minggu lalu dengan menarik undangan kepada Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel, yang akan bertemu dengan rekan Prancisnya di Calais untuk membahas krisis migran. Langkah Prancis dikritik karena kontraproduktif. ● gul

Kim Jong-un Ultah, Warga Korut Diperintahkan Buat Permen untuk Hadiah

SEOUL(IM) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan berulang tahun pada 8 Januari mendatang, membuat pemerintah negara terisolasi itu bergeser membuat kue dan permen untuk merayakannya. Imbasnya, mereka memaksa warga Korea Utara yang berada di ambang kelaparan untuk membayar biaya pembuatan hidangan ulang tahun Sang Pemimpin. Sementara Korea Utara berjuang menghadapi kekurangan pangan, yang bisa dibandingkan dengan bencana kelaparan yang melanda negara itu pada 1990, perayaan ulang tahun Kim Jong-un telah mengurangi pasokan tepung dan gula, menyebabkan harga bahan-bahan ini melambung.

"Sejak kemarin, harga satu kilogram tepung melonjak dari 12.000 won (Rp146.000,00) menjadi 30.000 won (Rp366.000,00). Harga gula juga melonjak dari 13.000 (Rp159.000,00) won menjadi 25.000 (Rp305.000,00) won," kata seorang penduduk Unsan, Provinsi Pyongan Selatan, Korea Utara dalam wawancara dengan Radio Free Asia's Korean Service.

Jalur produksi permen di Pyongyang disebut menjadi sektor yang paling terpuruk. Sumber yang menolak disebutkan namanya, mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mewajibkan setiap provinsi untuk memproduksi dan memasok makanan manis dan permen untuk anak-anak sebagai tanda ulang tahun dari Kim.

"Untuk membeli bahan baku permen, pihak daerah secara langsung mengenakan pajak 5.000 won (Rp61.000,00) untuk setiap rumah tangga," kata sumber kedua.

"Mereka bahkan menuntut setiap rumah menyediakan satu butir telur untuk produksi gula-gula. Karena orang harus membeli telur untuk disumbangkan di pasar lokal, dan pasar kehabisan telur," ungkap sumber tersebut.

Manisan yang diberikan kepada anak-anak ini telah lama dipraktikkan di Korea Utara. Ini dimulai oleh kakek pemimpin saat ini, Kim Il Sung.

Pada tahun-tahun awal pemerintahan Kim Jong-un, permen diberikan kepada siswa

di penitipan anak dan sekolah dasar serta ibu mereka di hari ulang tahunnya. Namun mulai 2019, tradisi ini diperluas dan sejak itu perayaan berubah menjadi memberikan hadiah permen untuk semua warga Korea Utara, yang akan dibagikan pada 1 Januari.

Karena perdagangan perbatasan telah dilarang karena pembatasan kesehatan terkait Covid-19, jumlah gandum dan gula impor mengalami kekurangan pasokan. Selain itu, kekurangan pangan yang meluas di negara itu juga dikaitkan dengan pembekuan perdagangan dengan Tiongkok, yang sebelum pandemi, telah memasok gula ke Korea Utara. Produksi permen harus memenuhi batas waktu di 20 Desember.

Oleh karena itu pemerintah sekarang mengendalikan distribusi semua tepung dan gula secara langsung, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya pasokan komoditi tersebut di pasar lokal dan memicu kenaikan harga bahan-bahan ini sampai semua produksi makanan manis ini selesai. ● ans

Militer Myanmar Dituding Jebak dan Bunuh Pengunjuk Rasa Anti-militer

YANGON (IM) - Kelompok hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW) menuduh pasukan keamanan Myanmar dengan sengaja menggepung dan menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa di Yangon. Menurut HRW, 65 pengunjuk rasa tewas pada 14 Maret di Yangon. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat (3/12), HRW menulis sebuah laporan yang menuduh pasukan keamanan dengan sengaja menggepung dan menggunakan kekuatan mematikan terhadap massa yang menyerukan penulih kembali pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis setelah kudeta militer pada 1 Februari.

"Tentara dan polisi yang dipersenjatai dengan senapan serbu militer menembak pengunjuk rasa yang terperangkap dan mereka yang mencoba membantu yang terluka, menewaskan sedikitnya 65 pengunjuk rasa dan pengamat di lingkungan kelas pekerja Yangon, Hlaing Tharyar," kata organisasi HAM yang berbasis di New York itu.

Temuannya didasarkan pada wawancara dengan enam saksi dan analisis dari 13 video dan 31 foto kekerasan yang diposting di media sosial. Rekaman yang ditinjau oleh HRW termasuk video TikTok yang diposting oleh seorang petugas polisi di mana petugas keamanan membahas senjata yang akan mereka gunakan.

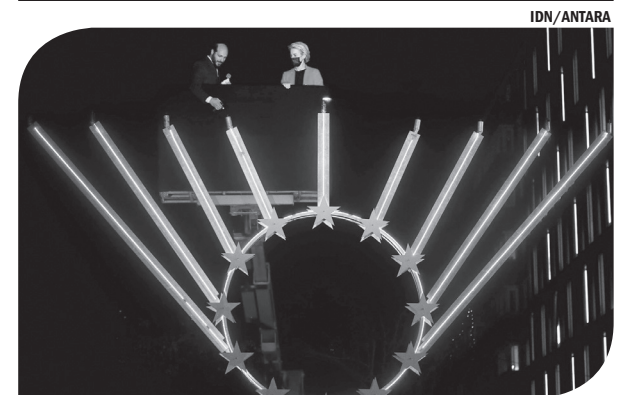
Dilaporkan pula, sebelum fajar pada 14 Maret, pengunjuk rasa menuju ke Jalan Sungai Hlaing utama Yangon untuk melakukan aksi duduk. Pasukan keamanan tiba sekitar pukul 10 pagi, memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri ke jalan-jalan samping. Berdasarkan analisis dari dua video dan citra satelit, HRW mengatakan pasukan keamanan menggepung atau "menembak" para pengunjuk rasa antara siang dan 12:40.

Seorang pengunjuk rasa, yang diidentifikasi sebagai "Zaw Zaw" untuk melindungi identitas mereka, mengatakan pasukan keamanan mulai dengan gas air mata dan peluru berlapis karet dan kemudian menembakkan peluru tajam.

"Dari pihak kami, kami menggunakan ketapel dan batu, dan beberapa bahkan melemparkan bom molotov ke belakang. Banyak orang tewas di depan mata saya. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu," kata Zaw Zaw.

Saksi mata menggambarkan situasi di mana mereka percaya pasukan keamanan membidik dan menembak demonstran. HRW telah mengaitkan keterangan saksi dengan video yang menunjukkan pasukan keamanan memotong rute keluar pengunjuk rasa dan dengan sengaja menyerang demonstran dan petugas kesehatan yang mencoba membantu yang terluka.

"Setidaknya empat orang tampak terluka saat mereka mencoba membantu orang lain. Salah satunya lemas dan tidak bergerak saat dia dibawa pergi dan yang lain berdarah dari punggungnya di trotoar," kata HRW. ● ans



PERAYAAN HANUKKAH DI BRUSSELS - BELGIA
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Rabbi Menachem Margolin berpartisipasi dalam menyalakan menorah dalam rangka perayaan Hanukkah di Brussels, Belgia, Kamis (2/12).

Jerman Kekurangan Tenaga Kesehatan

BERLIN (IM) - Dinas tenaga kerja Jerman, Bundesagentur fuer Arbeit (BA), sebelumnya sudah melakukan perundingan dan persiapan selama satu tahun, guna mendatangkan tenaga kesehatan dari negara bagian Kerala, India untuk bekerja di Jerman. Perekrutan tenaga kesehatan itu akan dilakukan melalui program khusus "Triple Win", yang dijalankan oleh BA bersama-sama dengan lembaga kerjasama internasional Jerman, GIZ.

Dengan program "Triple Win", tenaga kerja yang direkrut akan mendapat izin kerja dan izin tinggal di Jerman lewat jalur cepat. Perekrutan tenaga kesehatan itu hanya dilakukan lewat program "Triple Win", tanpa melibatkan lembaga pengimigran tenaga kerja swasta, kata dinas tenaga kerja Jerman, BA.

Setelah pembicaraan selama setahun, perjanjian akhirnya ditandatangani hari Jumat (03/12) oleh Direktur Internasional BA, Markus Biercher, dan Harikrishnan Nambhootheri, Direktur Norka Roots, mitra kerja resmi BA di Kerala. Dengan penandatanganan perjanjian itu, Jerman berharap bisa mengisi kekosongan tenaga kerja kesehatan yang makin akut.

Ini menjadi perjanjian kedua yang ditandatangani untuk mendatangkan tenaga kerja dari Asia. Akhir Agustus lalu, Jerman sudah menandatangani

perjanjian untuk mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia.

Dinas tenaga kerja Jerman menjelaskan, perekrutan semacam itu harus memenuhi persyaratan WHO, antara lain hanya bisa dilakukan dengan negara yang memiliki kelebihan tenaga kesehatan. Di negara bagian Kerala, jumlah tenaga kesehatan per penduduk memang lebih tinggi daripada angka rata-rata di seluruh India. Bagi Kerala, inilah perjanjian internasional pertama yang dibuat dengan sebuah negara anggota Uni Eropa.

Menurut rencana, tenaga kesehatan gelombang pertama sudah akan masuk ke pasar kerja Jerman tahun 2022. Pihak Jerman akan membiayai kursus bahasa selama beberapa bulan di negara asal dan juga melakukan pelatihan kerja untuk memperkenalkan sistem kerja di Jerman.

Kegiatan dinas tenaga kerja BA di luar negeri dimungkinkan dengan UU Baru dari 1 Maret 2020 tentang perekrutan tenaga kerja langsung dari negara asal. Menurut UU itu, BA berhak melakukan perundingan dengan negara asing untuk mendatangkan tenaga kerja untuk sektor-sektor yang mengalami kelangkaan tenaga kerja. UU itu juga mengatur jalur cepat pengakuan ijazah pendidikan tenaga kerja dari luar negeri dan prosedur khusus pemberian izin kerja dan izin tinggal di Jerman. ● gul



FESTIVAL CAHAYA KALEIDOSKOP DI KROASIA
Bangunan dihias cahaya lampu saat Festival Cahaya Kaleidoskop di Osijek, Kroasia, Kamis (2/12).